

## Jalur Sepeda di Ibu Kota Bakal Dievaluasi Total Tahun Depan

**JAKARTA (IM)** - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur sepeda tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, perencanaan evaluasi tersebut dikerjakan setelah Dishub DKI mendapatkan anggaran jalur sepeda Rp7,5 miliar dalam Rancangan APBD 2023.

Sebelumnya, anggaran jalur sepeda baru yang diajukan adalah Rp38 miliar. Namun, dari pembahasan RAPBD 2023 yang cukup alot dengan DPRD, nilai yang disetujui akhirnya Rp7,5 miliar. "Saat ini kan masih dalam pembahasan. Begitu dalam pembahasan terakhir pada Rabu kemarin kami kembali lakukan pembahasan dengan Komisi B, itu sudah ditambahkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Itu untuk kegiatannya pertama, setelah terbangunnya jalur sepeda 300 km kita akan evaluasi secara komprehensif. Dari hasil evaluasi tentu ada hasil rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti," ungkap Syafrin di Balai Kota, Jumat (18/11).

Ia menjelaskan, dalam melakukan evaluasi tersebut, Dishub DKI tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan lembaga non pemerintah yang independen. Syafrin menyebutkan, untuk optimalisasi hasil evaluasi itu, disiapkan Rp5 miliar dari total Rp7,5 miliar yang disetujui DPRD DKI. "Oleh sebab itu, dalam

anggaran sudah disiapkan misalnya bagaimana optimalisasi jalur sepeda sehingga kita perlu kampanye atau sosialisasi secara masif. Itu sudah tertampung di anggaran. Berikutnya kalau ada kegiatan yang harus ditampung dari hasil evaluasi optimalisasi tersebut sudah disiapkan anggaran lebih kurang Rp5 miliar untuk optimalisasi jalur sepeda. Tentu keseluruhan jalur sepeda baik kampanye maupun optimalisasi dilakukan setelah evaluasi komprehensif tadi," jelasnya.

Ia menambahkan evaluasi diperlukan untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pesepeda. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan keluhan atau saran yang berasal dari masyarakat. "Misalnya keberadaan *traffic cone* itu juga dikeluhkan masyarakat. Nanti kita evaluasi itu juga," tuturnya.

Di sisi lain, jumlah pesepeda di Jakarta sudah meningkat sangat pesat setelah dilakukan pengembangan jalur sepeda. "Sebelum ada jalur sepeda rata-rata 47 sepeda. Setelah dilakukan pengembangan jalur sepeda, bahkan terakhir di Agustus itu 4 ribu pesepeda per hari. Tentu ada peningkatan signifikan," imbuhnya.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan sebab tahun ini Pemprov DKI Jakarta membangun jalur sepeda secara masif. Syafrin menargetkan ada total penambahan jalur sepeda sepanjang 301 km tahun ini. ● **yan**

## WILAYAH KUMUH MASIH MENJAMUR

### Pemkot Jakbar Bakal Gelontorkan Rp70 Miliar untuk Benahi 60 RW

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Kota Jakarta Barat mengalokasikan Rp 70 miliar untuk membenahi 60 rukun warga kategori kumuh agar tertata rapi pada 2023. "Sekitar Rp70 miliar tapi ini masih rancangan APBD belum diketok palu," kata Kepala Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Agus Ruhayat, Jumat (18/11).

Agus mengatakan, pembenahan RW kumuh ini merupakan program yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memberikan lingkungan hunian yang layak bagi warga Ibu Kota.

Adapun penetapan 60 RW ini sebagai wilayah kumuh berdasarkan daftar data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Nantinya, Pemkot Jakbar akan memperbaiki beberapa infrastruktur yang dianggap rusak di 60 RW tersebut, seperti penerangan

jalan umum, saluran air, jalan, hingga trotoar.

Untuk memastikan pengerjaan berjalan dengan baik, Pemkot Jakbar akan menggandeng pihak konsultan untuk memastikan pembangunan fisik berjalan lancar. "Kami juga akan bentuk tim teknis untuk monitor pengerjaan di lapangan," kata Agus. Agus berharap pengerjaan yang berlangsung tahun depan itu bisa berjalan lancar sehingga warga bisa menikmati lingkungan permukiman yang layak.

Program penataan RW kumuh ini sudah berlangsung sejak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penataan RW Kumuh. Sejak pergub itu berjalan, tercatat sudah 92 RW telah dibenahi oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat. ● **yan**

### Pemkot Depok Kucurkan Rp15 Miliar Perbaiki Jalan Perumahan GDC

**DEPOK (IM)** - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan rekonstruksi lanjutan Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), Kota Depok Jawa Barat direkonstruksi sepanjang 1,8 km.

"Nilai kontrak sebesar Rp 15 miliar. Untuk pemerataan elevasi kami lakukan dengan ketebalan kurang lebih 10 cm karena eksisting jalan tidak rata. Sedangkan tinggi beton nantinya yaitu 20 cm," kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat (18/11).

Ia menjelaskan pekerjaan dilakukan dari Simpang Kartini sampai dengan Simpang KSU. Panjang jalan tersebut sudah termasuk jembatan GDC yang saat ini juga sedang direhabilitasi.

Dikatakannya, untuk lebar jalur cepat yaitu rata-rata tujuh meter. Proses pengerjaan telah dimulai sejak 29 September hingga 12 Desember 2022. Citra menyebut, pihaknya juga membuat crossing di antara simpang GDC dan KSU. Untuk memper-

cepat proses pengerjaan, pihaknya memberlakukan *contraflow*.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan demi kenyamanan bersama," katanya.

Lebih lanjut Citra mengatakan untuk mengatasi mobilitas pengguna jalan maka dilakukan sistem *contraflow* yang dilaksanakan sejak awal Oktober, kami sudah berlakukan *contraflow* panjangnya kurang lebih 1,1 km. Mulai dari Simpang GDC dan KSU sampai dengan Ruko Verbena GDC.

Dikatakannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok untuk memfasilitasi sistem tersebut.

Selain itu, marka jalan atau spanduk pemberitahuan juga terpasang di beberapa titik.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub untuk dapat memfasilitasi sistem *contraflow* ini. Alhamdulillah, direspon baik dan petugas Dishub ditempatkan di titik tersebut pada jam sibuk," jelasnya. ● **yan**

FOTO: ANT



### KARATE KATA PERORANGAN PUTRI KARATE 1 SERIES A JAKARTA

Karateka Indonesia Putri Aprilia tampil pada babak eliminasi Kata Perorangan Putri Karate 1 Series A di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (18/11).

# Ridwan Kamil Buka Opsi Pembangunan Masjid Agung Kota Depok Dibatalkan

Rumus sederhana yang dipegang Pemerintah Provinsi Jabar adalah, jika anggaran bantuan datang dari provinsi maka tugas kota/kabupaten menyediakan lahannya dengan baik dan aman. Apabila permasalahan lahan belum juga beres, pembangunan Masjid Agung Kota Depok bisa dibatalkan.

## BANDUNG (IM)

- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil menanggapi masalah pembangunan Masjid Agung Kota Depok di Jalan Margonda yang harus menggeser Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pondok Cina. Menurut dia, munculnya berita itu perlu diklarifikasi dan diluruskan agar tidak terjadi mispersepsi.

"Dalam kasus ini sebenarnya sederhana. Pemprov Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun rumah ibadah, silakan," kata Kang Emil melalui akun Twitter @ridwankamil dikutip Jumat (18/11).

Dia menyampaikan, rumus sederhana yang dipegang

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar adalah jika anggaran bantuan datang dari provinsi maka tugas kota/kabupaten menyediakan lahannya dengan baik dan aman.

"Itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SD Pondok Cina 1," ujar Ridwan Kamil.

Selama ini, pihak Pemprov Jabar mendapat laporan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bahwa lahan sudah aman terkendali. Pemkot juga menjamin ada rencana relokasi untuk aktivitas SD tersebut. Dia pun sempat bertanya kepada Pemkot Depok mengapa sekolah sampai harus direlokasi?

"Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah di sana.

Jadi jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima," kata Ridwan Kamil.

Apabila permasalahan lahan belum juga beres, Ridwan Kamil membuka opsi pembangunan Masjid Agung Kota Depok dibatalkan.

"Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan.

Demikian klarifikasinya. Hatur nuhun," kata mantan wali kota Bandung tersebut.

Rencana pemindahan dan pengurusan SDN 1 Pondok Cina mendapat tentangan dari orang tua murid. Guru pun sudah tidak mengajar di sekolah lantaran dilarang Pemkot Depok. Alhasil, siswa yang dikorbkan karena aktivitas belajar mengajar terganggu. Adapun lokasi sekolah akan dibangun Masjid Agung Kota Depok. ● **yan**

### Pemprov DKI Musnahkan 14.447 Botol Miras Ilegal di Silang Monas

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusnahkan sebanyak 14.447 botol minuman keras (miras) di Silang Monas Sisi Tenggara pada Jumat (18/11). Belasan ribu botol miras tersebut hasil sitaan dari 5 kota administrasi Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pemusnahan miras ini merupakan hasil patroli bersama Satpol PP, TNI dan jajaran Polri.

"Hari ini Pemprov DKI bersama Polda, Pengadilan Negeri, dan seluruh jajaran termasuk TNI beberapa waktu yang lalu dipimpin oleh Satpol PP tentunya dari Polda dan Kodam, melakukan operasi penertiban miras," ujar Heru Budi.

"Dan hari ini, sebagaimana laporan Pak Kasatpol PP tadi, sebanyak 14.447 botol telah dimusnahkan. Tentunya saya atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda, Kodam, dan Pengadilan Negeri yang telah bersama-sama menegakkan hukum terkait dengan minuman beralkohol tanpa izin," sambungnya.

Heru Budi berharap, dengan adanya kegiatan penertiban dan pemusnahan minuman beralkohol tersebut dapat memberikan gambaran bahwa Pemprov DKI Jakarta berupaya me-

lindungi masyarakat dari peredaran minuman beralkohol tanpa izin atau ilegal.

"Dengan memusnahkan barang-barang hasil operasi minuman beralkohol juga dapat meminimalisir dan mengendalikan peredaran tanpa izin di wilayah Jakarta, serta melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol bahkan minuman oplosan yang dapat mengakibatkan kematian," tuturnya.

Heru juga menegaskan, bahwa kegiatan penertiban dan pemusnahan minuman beralkohol ini dilaksanakan secara terus-menerus atau konsisten. Kemudian juga dilakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif, serta prinsip KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi).

Pengawasan atas penyalahgunaan konsumsi ataupun peredaran minuman beralkohol adalah kewajiban seluruh warga. Sebab kondisi tersebut sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial bahkan kriminalitas.

Untuk itu, Pj Heru Budi pun mengajak tokoh-tokoh lingkungan dalam kepemimpinan dalam masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mengampanyekan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Jakarta. ● **yan**

## Akses Jembatan Cibubur Mulai Dibuka Bagi Pengendara

**JAKARTA (IM)** - Akses Jembatan Cibubur di Jalan Lapangan Tembak perbatasan Kecamatan Ciracas dan Pasar Rebo, Jakarta Timur, mulai dibuka bagi pengendara.

Camat Pasar Rebo, Mujiono mengatakan, akses Jembatan Cibubur itu telah dibuka bagi pengendara roda dua dan empat meskipun saat ini proses pekerjaan belum rampung 100 persen. "Masih dalam proses 'finishing', namun sudah dilalui kendaraan roda dua dan empat secara terbatas," kata Mujiono di Jakarta, Jumat (18/11).

Mujiono menambahkan, Jembatan Cibubur merupakan akses jalan yang menjadi pilihan utama bagi warga dalam aktivitas sehari-hari karena lokasinya strategis.

"Memang secara resmi belum dibuka. Namun kemungkinan warga yang terbiasa lewat jembatan tersebut sudah tidak sabar,

karena tentu lebih pendek jarak tempuhnya," ujar Mujiono.

Mujiono menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi pasti dari pihak pelaksana proyek yang ditunjuk Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Timur terkait dibukanya akses bagi pengendara.

Mujiono mengatakan, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah Jembatan Cibubur sudah bisa dilintasi kendaraan berat seperti truk.

"Tidak ada pemberitahuan ke kami dan sosialisasi kepada masyarakat kapan kendaraan bisa melalui jembatan tersebut. Seperti halnya akses jalan yang menjadi pilihan utama bagi warga dalam aktivitas sehari-hari karena lokasinya strategis.

"Kami secara resmi belum dibuka. Namun kemungkinan warga yang terbiasa lewat jembatan tersebut sudah tidak sabar,

mengalami keterlambatan.

Alasan keterlambatan proyek karena ada masalah kontur tanah sewaktu tahap awal pemasangan tiang pancang yang butuh diuji laboratorium.

"Ada kondisi tanah yang bermasalah di awal. Kita kan harus kaji lagi kondisi, jadi di luar prediksi ada lensa (kontur tanah)," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Timur, Bernhard Hutajulu di Pasar Rebo, Jakarta, Selasa (8/11).

Akibat masalah kontur tanah di lokasi pengerjaan itu membuat tiang pancang yang dipasang patah, sehingga butuh waktu bagi Sudin Bina Marga Jakarta Timur untuk mempelajarinya.

"Jadi enggak bisa kita salahkan kontraktornya juga, karena itu ada kondisi tanah. Jadi masyarakat melihat itu kok enggak dikerjakan. Bukan enggak dikerjakan, tapi laboratorium yang kerja," ujar Bernhard. ● **yan**

FOTO: ANT



### SDN PONDOK CINA 1 BELAJAR TANPA GURU

Wali murid memberikan materi pelajaran di SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/11). Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut sudah empat hari berlangsung tanpa guru dan digantikan oleh relawan atau wali murid, disebabkan protes terkait relokasi sekolah.